

## KAIDAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PERTAHANAN PADA IBU KOTA BARU REPUBLIK INDONESIA

**Agus Subagyo dan Udaya Madjid**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unjani Cimahi

Wakil Dekan III Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Jatinangor

Email: agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id, udaya.madjid@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Negara pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia, yang seharusnya dirancang melalui dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*), sehingga akan mampu menjadi ibu kota yang *smart and green city* sekaligus juga menjadi *secure and defence city*, dalam menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nir militer. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur / penelaahan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa dalam membangun Ibu Kota Baru Negara Republik Indonesia diperlukan sinergi dengan RTRW Pembangunan yang dibuat oleh Bappenas dan pihak terkait lainnya dengan tetap mengacu pada ketentuan dan paradigma prosperity dan security.

**Kata kunci** : Rencana Tata Ruang, Wilayah Pertahanan, Ibu Kota Indonesia.

## SPATIAL PLANNING DEFENCE AREA (RTRW) IN REPUBLIC OF INDONESIA'S NEW CAPITAL CITY

### ABSTRACT

*This study analyzes the Spatial Planning of National Defense in the New Capital of the Republic of Indonesia, which should be designed through two approaches at once, namely the prosperity approach and the security approach, so that it will be able to become a capital city smart and green city as well as being a secure and defense city, in facing threats, both military threats and non-military threats. By using qualitative methods and data collection techniques in the form of observation, interviews, and literature study / documentation review, it can be concluded that in building the New Capital City of the Republic of Indonesia, synergy with the RTRW of Development made by the National Development Planning Agency and other related parties is required while still referring to the provisions and paradigms of prosperity and security.*

**Keyword**: Spatial Planning, Defense Area, Capital of Indonesia.

### PENDAHULUAN

Tepat pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, di Istana Negara, saat konferensi pers, Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi bahwa ibu kota baru Republik Indonesia berada di Pulau Kalimantan, di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.<sup>1</sup> Presiden Jokowi menyatakan secara tegas bahwa keputusan pemerintah ini telah melalui proses

kajian yang mendalam dan intensif, khususnya sejak 3 (tiga) tahun terakhir. Keputusan pemindahan ibu kota di Provinsi Kalimantan Timur ini telah mengakhiri polemik dan teka teki kemana ibu kota akan dipindahkan oleh pemerintahan Jokowi.

Sebelumnya, telah terjadi perdebatan dan wacana tentang yang panjang dan sengit di berbagai media sosial maupun media massa tentang wilayah mana yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

<sup>1</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-di-sebagian-penajam->

[paser-utara-dan-kutai-kartanegara?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-di-sebagian-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara?page=all).  
Diunduh pada tanggal 28 September 2019, Pukul 12.15 WIB.

Muncul usulan dari berbagai pihak untuk wilayah calon ibu kota baru dengan berbagai alasan dan argumentasi, seperti di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Tengah. Mengingat wilayah ibu kota merupakan wilayah yang strategis, maka setiap daerah banyak yang meng-harapkan agar supaya daerahnya menjadi ibu kota karena diyakini akan me-ningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong pembangunan infrastruktur, dan sejumlah multiplier effect lainnya.

Dilihat dari aspek kesejarahan, wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah lain di Indonesia telah ada ide dan gagasannya sejak Orde Lama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno<sup>2</sup>. Presiden Soekarno pernah merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, yakni di Palangkaraya (Kalimantan Tengah) dan Samarinda (Kalimantan Timur). Presiden Soeharto pada masa Orde Lama juga pernah merencanakan memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah Jonggol, namun keburu lengser oleh gelombang reformasi. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda juga memiliki ide untuk memindahkan ibu kota ke wilayah Bandung, Provinsi Jawa Barat, karena dianggap sejuk dan asri secara lingkungan hidup dan cocok untuk pertahanan negara menghadapi serangan Jepang karena berada di wilayah ketinggian, perbukitan dan pegunungan.

Tugas berat berikutnya pemerintahan Jokowi adalah mem-bangun ibu kota baru Republik Indonesia di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah harus memiliki visi yang jauh ke depan dalam merancang bangun struktur dan arsitektur dengan desain tata kota yang modern, ramah lingkungan, terpadu, dan terintegrasi. Perencanaan tata kota dan penataan gedung pemerintahan yang terhubung dengan fasilitas transportasi, sarana perumahan, pemukiman, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum, serta fasilitas sosial lainnya, harus dirancang secara

sistematis, terstruktur dan bernuansa futuristik, serta memiliki nilai-nilai peradaban bangsa yang modern. Tata letak kawasan perkantoran, gedung pemerintahan dan pusat layanan publik serta layanan masyarakat lainnya harus terintegrasi dan *connected* dengan kawasan pemukiman, perumahan, apartemen, pusat ekonomi masyarakat, dan taman kota yang asri, modern, serta sejuk.

Selain itu, yang kadang kala dilupakan oleh berbagai pihak, khususnya para perencana kota maupun ahli tata ruang wilayah, adalah desain tata kota dalam ibu kota baru harus berbasis pada aspek pertahanan negara. Artinya, rencana tata ruang wilayah untuk ibu kota baru harus pula memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan negara (*security approach*), di samping memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (*prosperity approach*). Dalam merancang pembangunan ibu kota baru, diperlukan pula perpaduan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Negara. Wilayah ibu kota merupakan wilayah yang strategis, dimana kepala negara dan atau kepala pemerintahan beserta semua pimpinan lembaga negara / pemerintahan berkantor dan bekerja sehari-hari sehingga harus berada dalam kondisi yang aman dari setiap ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nir militer.

Oleh karena itu, wilayah ibu kota baru harus memiliki dokumen RTRW Pertahanan Negara yang menjadi panduan, pedoman, dan rambu-rambu bagi pemerintah, pengembang, kontraktor dan berbagai pihak terkait lainnya, dalam merancang, mengembangkan, dan membangun kawasan ibu kota yang harus memperhatikan aspek pertahanan negara. Desain, tata letak, tata ruang dan rencana detail tata ruang (RDTR) nya harus berdasarkan pada pertimbangan dan mematuhi dokumen RTRW Pertahanan Negara yang berlaku di kawasan ibu kota baru tersebut. Hal ini diperlukan mengingat apabila terjadi ancaman atau dalam kondisi perang, maka sasaran utama untuk

<sup>2</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/18544621/wacana-pemindahan-ibu-kota-pada-era->

soekarno-dan-sebelumnya?page=all. Diunduh pada tanggal 28 September 2019, Pukul 12.15 WIB.

diserang musuh adalah kantor-kantor pemerintahan di wilayah ibu kota, sehingga diperlukan pembangunan kawasan ibu kota baru yang menjamin keamanan dari serangan musuh yang setiap saat bisa mengancam kedaulatan negara.

### KERANGKA TEORITIS

Dalam perspektif teoritik, dalam penyusunan proses pembangunan suatu kawasan / wilayah / daerah memerlukan pendekatan yang terpadu, terintegrasi, dan komprehensif, yang ditinjau dari semua aspek kehidupan nasional. Dalam perencanaan tata ruang wilayah harus didekati dengan pendekatan yang sering dikenal dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).

Pendekatan kesejahteraan me-mandang bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara harus memprioritaskan pada kesejahteraan masyarakat, berorientasi pada manusia, mengarah pada pem-bangunan manusia (*human development*), dan semua dirancang untuk memanusiakan manusia. Kebijakan pembangunan nasional berupa pembangunan infrastruktur, pem-bangunan fisik, pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas publik lainnya harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Pembangunan nasional harus mampu memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sebagai manusia, mendukung setiap lingkungan manusia, dan menciptakan ruang publik yang mampu memberikan nilai, norma dan peradaban baru bagi kehidupan umat manusia.

Pendekatan keamanan melihat bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu menjamin terciptanya rasa aman masyarakat dari berbagai ancaman yang akan terjadi. Setiap aktifitas, kegiatan, dan program yang dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa adanya jaminan rasa aman, maka proses perencanaan pembangunan dengan

segala program dan kegiatannya akan mengalami gangguan dan hambatan<sup>4</sup>. Dalam prakteknya, setiap program dan kegiatan pembangunan pasti akan mengalami tentang dan rintangan baik dari dalam maupun dari luar, yang tentunya akan menggagalkan program dan kegiatan pembangunan nasional apabila tidak diantisipasi secara dini.

Dalam aplikasinya di lapangan, proses perencanaan pembangunan nasional, yang tertuang dalam dokumen rencana detail tata ruang wilayah (RDTR) maupun dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), baik RTRW Pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah maupun RTRW Pertahanan yang dikeluarkan oleh TNI, harus berjalan secara serasi dan seimbang. Sinkronisasi RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan harus diimplemen-tasikan sampai ke tingkat operasional, agar supaya pembangunan nasional dapat berjalan secara baik dan optimal.

Pembangunan ibu kota baru harus berbasis pada pendekatan kesejahteraan yang tertuang dalam RTRW Pembangunan dan berdasarkan pada RTRW Pertahanan sehingga akan terwujud pembangunan kawasan ibu kota baru yang sejahtera dan aman. Sejahtera karena mampu mempe-domani RTRW pembangunan yang dibuat oleh pemerintah dan aman karena mengikuti aturan, prosedur dan koridor yang tertuang dalam RTRW Pertahanan yang dibuat oleh Kemenhan dan TNI.

Dalam kaitan ini, Michael Boweel, dalam bukunya : *Defence Management Strategy* (2014) menyatakan bahwa penyusunan RTRW Pertahanan harus dilihat dari aspek atau dimensi : **(1) kestrategisan wilayah dan kestrategisan politik pertahanan. Artinya, pembahasan dalam artikel ini akan diarahkan pada aspek strategi wilayah (seperti rentang kendali, jangkauan wilayah, infrastruktur, dan dukungan ekonomi) dan aspek strategi politik pertahanan (seperti geo strategi, geo politik, dan geo pertahanan).**

<sup>3</sup> Hermawan Sulisty, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*, Jakarta : Grafika Indah, 2009, hal. 16.

<sup>4</sup> Prabakharan Paleri, *National Security : Imperatives and Challenges*, New Delhi : Tata McGraw-Hill, 2008, hal. 37.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode riset yang mengungkap makna dibalik data, makna dibalik angka, dan mencari arti / meaning atas peristiwa dan fenomena yang terjadi<sup>5</sup>. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan

studi dokumentasi atau studi pustaka / studi literatur. Dilakukan pula *focus group discussion* (FGD) antar *stakeholder* terkait.

Teknik sampling untuk memilih informan menggunakan *purposive sampling* / sampling bertujuan. Sedangkan unsur, jenis, dan jumlah informan dalam penelitian ini dapat divisualisasikan dalam tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1. Daftar Informan Penelitian**

NO	UNSUR	INFORMAN	JUMLAH
1	Kementerian	Kemenhan	1
		Kementerian ATR/BPN	1
		Kementerian PUPR	1
		Bappenas	1
		Sub Total	4
2	TNI	Mabes TNI	1
		Mabes TNI AD	1
		Mabes TNI AL	1
		Mabes TNI AU	1
		Kodam VI/Mulawarman	1
		Sub Total	5
3	Pakar/Ahli	LIPI	1
		CSIS	1
		Sub Total	2
4	Masyarakat	OKP	2
		Ormas	2
		Tokoh Masyarakat	2
		Tokoh Agama	2
		Tokoh Pemuda	2
		Pers / Media	2
		NGO / LSM	2
		Sub Total	14
		<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

## PEMBAHASAN

### 1. Dimensi Kestrategisan Wilayah Ibu Kota Baru Republik Indonesia

Sebagai ibu kota baru Republik Indonesia, wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki posisi dan lokasi yang strategis, sehingga Presiden Jokowi memilih wilayah ini menjadi ibu kota baru, sebagai

pengganti DKI Jakarta. Wilayah yang dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi ibu kota baru berada diantara Kota Samarinda dan Balikpapan serta berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Presiden Jokowi sendiri telah mengungkapkan alasan memilih wilayah ini menjadi ibu kota baru Republik Indonesia, dimana terdapat 5 (lima) alasan sebagai berikut

<sup>5</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika, 2010, hal. 26.

: (1) Resiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor; (2) Lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia. Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km, terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km; (3) Wilayah itu ada di dekat perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda; (4) Infrastruktur yang relatif lengkap; (5) Di dua tempat itu tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 hektar.<sup>6</sup>

Di samping itu, sebenarnya ada beberapa alasan lain yang kemungkinan dipertimbangkan oleh pemerintah terkait mengapa lebih memilih Kalimantan Timur, dibandingkan dengan Kalimantan Tengah misalnya. Dalam aspek historis, sebenarnya Presiden Soekarno lebih cenderung memilih Palangkaraya sebagai ibu kota baru pengganti Jakarta, yang terbukti dengan dibangunnya Tugu Soekarno sebagai tanda peletakan batu pertama pada tanggal 17 April 1957. Namun demikian, aspek kesejarahan, khususnya sejarah konflik etnis di wilayah Kalimantan Tengah, terutama kerusuhan etnis pada awal reformasi juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak memilih Kalimantan Tengah dan menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru.

Dalam aspek sosiologis, kerukunan antar etnis, antar umat beragama, dan antar kelompok masyarakat di wilayah Kalimantan Timur relatif terjaga dengan baik. Hampir tidak pernah ada konflik, kekerasan dan kerusuhan sosial di wilayah Kalimantan Timur, yang menjadi perhatian dan sorotan nasional, karena memang kehidupan sosial masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur berjalan secara harmonis.<sup>7</sup> Resistensi masyarakat asli terhadap pendatang hampir tidak ada, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat memiliki

pandangan yang modern, terbuka dan *open minded*. Antara penduduk asli dan penduduk pendatang telah berbaur dengan sangat erat sehingga integrasi sosial masyarakat sangat tinggi. Inilah kemungkinan yang membuat pertimbangan pula kenapa pemerintah lebih memilih Provinsi Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru Republik Indonesia.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan RI, Prof Dr, Ir Bondan Tiara Sofyan, yang menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, sangat cocok menjadi ibu kota baru Republik Indonesia dilihat dari aspek strategis wilayah, karena rentang kendali, daya dukung, daya tampung dan daya tarik wilayah yang potensial berkembang secara cepat, tepat dan sinergis.

## 2. Dimensi Kestrategisan Politik dan Pertahanan Ibu Kota Baru Republik Indonesia

Dalam perspektif geo politik dan geo strategi, wilayah ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur tepat berada di tengah-tengah Indonesia. Wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada di antara Sabang dan Merauke serta berada di antara Miangas dan Rote. Wilayah Kalimantan Timur pada khususnya dan Pulau Kalimantan pada umumnya yang masih bernuansa hutan sangat cocok untuk menerapkan taktik perang berlarut dengan tehnik gerilya yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Apabila ibu kota diserang oleh musuh, maka perang berlarut dan perang gerilya merupakan alternatif paling terakhir untuk menghadapi musuh, ketika perang konvensional sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan ibu kota.

Ibu kota baru sangat cocok dari aspek pertahanan negara, dalam kerangka keamanan nasional. Ibu kota baru dekat dengan negara tetangga, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Wilayah perbatasan darat dengan Malaysia dan Brunei Darussalam selama ini

<sup>6</sup><https://tirto.id/alasan-jokowi-pilih-penajam-kutai-jadi-ibu-kota-baru-ganti-jakarta-eg2i>. Diunduh pada tanggal 28 September 2019, Pukul 12.15 WIB.

<sup>7</sup><https://nasional.okezone.com/read/2019/08/30/337/2098795/jadi-ibu-kota-baru-kaltim-minim-konflik-sosial-tapi-kritis-secara-lingkungan>. Diunduh pada tanggal 29 September 2019, Pukul 10.15 WIB.

sangat rawan adanya aksi kejahatan transnasional, khususnya illegal logging, illegal fishing, illegal mining, drug trafficking, maupun pelintas batas tradisional, yang membahayakan kedaulatan Indonesia. Dengan ibu kota baru di Kalimantan Timur, maka wilayah perbatasan darat dengan Malaysia dan Brunei Darussalam akan semakin dketatkan agar supaya mampu mengantisipasi dan menangkal setiap ancaman yang potensial muncul.

Selain itu, wilayah Kalimantan Timur juga berdekatan dengan Filipina, khususnya terdapat titik rawan konflik dan rawan kejahatan laut, seperti di perairan sulu, perairan sulawesi bagian utara, karena banyak aksi terorisme yang melewati wilayah ini termasuk adanya kelompok pemberontak atau teroris Abu Sayyaf yang berafiliasi dengan ISIS dan kelompok teroris yang ada di Indonesia. Hal ini tentu perlu diwaspadai mengingat wilayah ibu kota berada di Kalimantan Timur yang sangat dekat dengan wilayah perbatasan laut antara Indonesia dengan Filipina.

Rentang kendali wilayah ibu kota yang berada di tengah-tengah Indonesia sangat memudahkan untuk adanya gelar pasukan ke semua titik wilayah Indonesia jika menghadapi serangan musuh. Penggelaran pasukan bisa dilakukan secara lebih cepat dan respon terhadap serangan musuh akan semakin efektif karena pusat komando militer berada di wilayah Kalimantan Timur yang merupakan center of gravity Indonesia. Ibu kota adalah center of gravity dimana semua pusat pemerintahan, pejabat politik, pejabat pemerintahan, dan pusat komando militer berada di ibu kota, sehingga wilayah Kalimantan Timur ke depan akan menjadi sasaran utama untuk diserang, dihancurkan, dan diduduki musuh sehingga diperlukan Road Map RTRW Pertahanan Negara di ibu kota baru Republik Indonesia.

Hal yang menguatkan dapat ditampilkan hasil wawancara dengan Aster Kasad, Mayjen TNI Bhakti Agus Fajari, yang menekankan bahwa dari aspek strategis politik dan pertahanan, wilayah ibu kota baru yang

dipilih dan ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi telah tepat karena wilayah ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan Malaysia dan Filipina dimana wilayah perbatasan darat dan laut antara Indonesia dengan kedua negara tersebut sangat rawan dengan aksi kejahatan transnasional sehingga akan mendapatkan perhatian yang lebih, khususnya pengerahan pasukan yang sangat cepat dari wilayah ibu kota baru ke wilayah perbatasan tersebut.

### **3. Kaidah Pembangunan Infrastruktur dan Gedung Vital Pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia**

Dalam aspek pertahanan negara, TNI harus selalu responsif, adaptif, responsif dan fleksibel terhadap perubahan zaman. TNI harus mampu mengikuti perkembangan lingkungan strategis, perkembangan di tingkat global, regional, nasional, dan lokal. TNI harus mampu bersinergi dengan semua komponen bangsa, khususnya pemerintah dan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta<sup>8</sup>. Pemindahan ibu kota negara juga harus mampu diantisipasi oleh TNI dengan memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi semua wilayah ibu kota baru beserta isinya, dengan menyusun road map RTRW Pertahanan Negara yang kuat, modern, terpadu dan terintegrasi.

Sebagai ibu kota baru Republik Indonesia, wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu didesain, dirancang, dikembangkan, dan dibangun dengan memperhatikan aspek *prosperity approach* dan *security approach*. Dengan kata lain, pembangunan wilayah ibu kota baru harus tetap memperhatikan dan berpedoman pada RTRW pembangunan dan RTRW Pertahanan. Tidak boleh pembangunan ibu kota baru hanya dirancang berdasarkan RTRW pembangunan semata, melainkan harus berbasis pula pada RTRW Pertahanan.

RTRW Pembangunan selama ini dibuat oleh pemerintah dengan dasar pada Undang-

<sup>8</sup> Indria Samego, *TNI Di Era Perubahan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2000, hal. 2 – 6.

Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun RTRW Pertahanan dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan TNI dengan dasar yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara<sup>9</sup>.

Secara lebih detail, diperlukan road map RTRW Pertahanan Negara yang dirancang oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, yang dapat dijadikan masukan dan saran bagi Bappenas dan pihak terkait lainnya dalam melakukan layout, tata letak, dan desain ibu kota baru Republik Indonesia. Hendaknya, tata ruang, tata letak dan desain ibukota baru harus memperhatikan aspek pertahanan negara yang tertuang dalam RTRW Pertahanan Negara. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun ibu kota baru harus berbasis pada aspek pertahanan negara sebagai berikut :

- a. Pembangunan Jalan. Rancang bangun pembangunan jalan untuk kepentingan transportasi umum dan kepentingan publik di wilayah ibu kota baru harus didesain secara luas / lebar agar supaya jika terjadi keadaan gawat darurat / darurat perang, maka jalan-jalan di wilayah ibu kota dapat dilakukan pendaratan darurat pesawat terbang maupun pesawat tempur, apabila bandara maupun pangkalan udara militer hancur dan rusak diserang musuh. Fungsi jalan – jalan utama dan jalan-jalan protokol tersebut dalam keadaan damai atau untuk keseharian merupakan jalan umum untuk kepentingan transportasi masyarakat, namun bisa dirancang menjadi landasan
- b. Pesawat jika negara dalam keadaan perang.
- b. Pembangunan Gedung. Tata letak dan *layout* pembangunan gedung-gedung pemerintahan harus ditata secara sistematis yang memudahkan semua pihak bisa berkoordinasi dengan cepat apabila negara dalam keadaan genting atau darurat perang. Gedung istana negara, istana presiden, dan gedung-gedung kementerian maupun lembaga negara non kementerian harus ditata secara apik, rapi, dan terintegrasi. Dalam perspektif pertahanan negara, idealnya gedung kementerian pertahanan, kementerian luar negeri, dan kementerian dalam negeri, harus berada dekat dengan istana negara / istana presiden, agar supaya memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam situasi krisis maupun dalam kondisi kegentingan. Ditambah lagi dengan gedung untuk pangkalan militer harus berada di tempat yang strategis agar supaya mampu melakukan komunikasi, koordinasi dan gelar pasukan yang cepat dan tepat ketika harus mengamankan ibu kota dari serangan musuh.
- c. Pembangunan Helipad. Dalam membangun istana negara / istana presiden, gedung-gedung kementerian maupun lembaga negara non kementerian harus dirancang arsi-tektur yang memungkinkan helikopter bisa mendarat di atas atap (*rooftop*) gedung-gedung tersebut. Maksudnya, setiap gedung pemerintahan harus menyediakan tempat di atap gedung semacam helipad yang memungkinkan setiap helikopter dapat mendarat untuk melakukan evakuasi, respon cepat, maupun kegiatan gawat darurat lainnya ketika negara dalam keadaan perang atau ketika ibu kota diserang oleh musuh. Helipad di setiap gedung pemerintahan harus ada, merupakan sebuah keharusan, dan suatu keharusan di wilayah ibu kota

<sup>9</sup> Agus Subagyo, “Sinkronisasi RTRW Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan RTRW

Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi”, dalam *Jurnal Agregasi Unikom*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2016, hal. 132.

baru, agar supaya mampu mengadaptasi setiap perkembangan krisis.

- d. Pembangunan Lorong Antar Gedung. Desain antar gedung pemerintahan di wilayah ibu kota harus terhubung satu dengan yang lainnya, terutama antara Istana Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan, dimana terdapat lorong bawah tanah yang bersifat rahasia, terbuat dari baja, dan anti terhadap rudal, yang dapat mempermudah jalinan komunikasi dan koordinasi antara presiden dengan semua menteri dan pejabat tinggi lainnya, ketika negara diserang musuh maupun ketika ibu kota diduduki oleh musuh, sehingga lorong bawah tanah ini dapat dijadikan sebagai evakuasi maupun sebagai sarana untuk temu cepat dan respon cepat terhadap apa yang terjadi dan keputusan apa yang harus dilakukan.
- e. Pembangunan Bunker. Di setiap gedung pemerintahan, termasuk istana negara, harus dibuat bunker-bunker bawah tanah, dilapisi oleh baja, ditempatkan secara rahasia, dan dirancang anti rudal dengan fasilitas yang lengkap untuk evakuasi, persembunyian, maupun titik pertemuan setiap pejabat negara ketika negara dalam keadaan perang. Dalam perang, pasti serangan udara dilakukan musuh dengan sasaran utama adalah presiden, menteri, pejabat militer, dan pejabat penting lainnya, sehingga bunker-bunker di setiap gedung pemerintahan harus dibangun untuk tempat evakuasi dan persembunyian yang aman dari serangan musuh.
- f. Pembangunan Gorong-Gorong. Selama ini, pembangunan gorong-gorong di wilayah perkotaan dipergunakan untuk instalasi listrik, telekomunikasi, maupun saluran air serta kepentingan sipil lainnya. Dalam perspektif pertahanan negara, gorong-gorong harus bisa dipakai oleh tentara untuk melakukan manuver, evakuasi, persembunyian, maupun untuk kepentingan taktik perang gerilya maupun

perang berlarut dengan strategi *hit and run*. Pembangunan gorong-gorong di wilayah ibu kota baru harus dirancang tidak hanya untuk kepentingan sipil semata, melainkan harus mampu dipergunakan untuk kepentingan militer jika dalam keadaan darurat. Artinya, gorong-gorong harus dirancang secara luas, lebar, dan mampu dilewati oleh manusia sehingga akan bermanfaat dalam kondisi peperangan.

- g. Pembangunan *Command Center* / Pusat Komando. Gedung istana negara, istana presiden, dan kantor presiden harus dirancang dengan pembangunan pusat komando, *command center*, crisis center, dan sejenisnya agar mampu melakukan komando, pengendalian, komunikasi, koordinasi, maupun perintah secara cepat jika negara diserang musuh maupun negara dalam keadaan darurat perang. Pembangunan *command center* juga seyogyanya dirancang di setiap kantor pemerintahan / kantor kementerian, khususnya Kementerian Pertahanan RI. Kementerian Pertahanan RI adalah "Pentagon"-nya Indonesia, sehingga harus dibangun pusat komando yang mampu mendeteksi setiap wilayah Indonesia, dilengkapi dengan fasilitas teknologi yang canggih, teknologi radar, maupun teknologi penginderaan jarak jauh lainnya, sehingga setiap ancaman musuh, dari laut, udara, dan darat, mampu ditangkap, dideteksi, dan ditangkal secara cepat, tepat, dan dini.

#### 4. Implementasi RTRW Pertahanan Pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia

Dokumen RTRW Pertahanan Negara selama ini dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. RTRW Pertahanan Darat, Laut, dan Udara di buat masing-masing oleh Mabes Angkatan. Sedangkan dalam RTRW Pertahanan Darat, setiap Kotama / Koter / Satuan Komando Kewilayahan (Satkowl) umumnya membuat RTRW Pertahanan Darat baik di tingkat Kodam, Korem, maupun



Kodim<sup>10</sup>. Penyusunan dokumen yang menjadi *road map* RTRW Pertahanan Darat ini selalu dilakukan secara sistematis, rapi, dan memperhitungkan hakekat ancaman. Oleh karena itu, dokumen RTRW Pertahanan Darat di Kodim mengacu pada dokumen RTRW Korem, Kodam, dan Mabes TNI AD<sup>11</sup>.

*Road map* RTRW Pertahanan Negara pada ibu kota baru Republik Indonesia harus mampu diimplementasikan agar supaya perlindungan terhadap ibu kota dari ancaman musuh dapat terjamin. Ibu kota adalah *center of gravity* setiap negara sehingga harus mampu diberikan jaminan keamanan dan perlindungan oleh militer di setiap negara. Untuk menjamin ibu kota baru aman dari ancaman musuh, maka *road map* RTRW Pertahanan Negara harus diimplementasikan oleh semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berwenang dalam merancang, membangun dan mendesain ibu kota baru Republik Indonesia.

Dalam rangka mengimplemen-tasikan *road map* RTRW Pertahanan Negara di wilayah ibu kota baru Republik Indonesia, maka diperlukan komitmen, kemauan dan persiapan dari semua pihak terkait, di setiap level, baik level kebijakan, strategi, maupun pada level operasional teknis di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah persiapan sebagai berikut :

- a. Pada level Kementerian Pertahanan RI, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan, harus mengecek kembali dokumen RTRW Pertahanan Negara, khususnya RTRW Pertahanan di wilayah Kalimantan, utamanya Kalimantan Timur, yang harus direvisi, diubah, dan disesuaikan dengan calon ibu kota baru yang akan dibangun. Setelah dilakukan revisi dan penyesuaian, maka dokumen RTRW Pertahanan Negara tersebut harus diserahkan, dikomunikasikan, dikoordinasikan, dan disinkronkan dengan RTRW Pembangunan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini, Bappenas RI, agar supaya menjadi pertimbangan penting dalam merancang,

mendesain, menata, dan membangun ibu kota baru tersebut.

- b. Pada level Bappenas RI, harus mampu mengadaptasi RTRW Pertahanan Negara tersebut dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, pihak kontraktor, pihak pengembang, maupun pihak ketiga / swasta lainnya yang ditunjuk untuk merancang bangun ibu kota baru. Artinya, dalam membangun ibu kota baru harus meminta nasehat, masukan, dan arahan kepada ahli tata ruang pertahanan dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI agar supaya tata letak, desain, dan *layout* ibukota mampu menyesuaikan dengan RTRW Pertahanan Negara dan mengadaptasi sisi pertahanan negara.
- c. Pada level operasional di lapangan, pada setiap tahapan pembangunan ibu kota baru, baik pembangunan sarana prasarana, infrastruktur, fasilitas sosial, fasilitas umum, maupun fasilitas publik lainnya harus melibatkan personil ahli dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, maupun Mabes Angkatan, sebagai konsultan teknis yang akan meninjau setiap pembangunan infrastruktur dari aspek pertahanan negara. Diskusi, dialog, asistensi, dan koordinasi teknis harus sering dilakukan untuk mencocokkan dan mensinkronkan antara RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan agar supaya terwujud *layout*, desain, dan tata letak kawasan ibu kota negara yang aman dan sejahtera.
- d. Pada aspek penggelaran pasukan TNI, sudah saatnya Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan, atas pengawasan dan persetujuan Komisi I DPR, memetakan kembali gelar pasukan TNI

<sup>10</sup> Mabes TNI AD, *Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat*, Jakarta, 2010, hal. 5.

Kaidah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia  
(Agus Subagyo dan Udaya Madjid)

<sup>11</sup> Staf Teritorial Mabes TNI AD, *Buku Penyusunan RTRW Pertahanan Darat*, Jakarta, 2010, hal. 2.

di berbagai wilayah, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Artinya, pusat pemerintahan ke depan akan berada di Pulau Kalimantan, sedangkan pusat ekonomi dan bisnis akan berada di Pulau Jawa. Selama ini, gelar pasukan memang dititikberatkan di Pulau Jawa karena memang saat itu pusat pemerintahan, pusat ekonomi / bisnis, dan jumlah penduduk terdapat ada di Pulau Jawa. Namun demikian, dengan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan, maka *center of gravity* bergeser dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, sehingga gelar pasukan ke depan harus menambah kekuatan ke Pulau Kalimantan, tanpa mengurangi gelar pasukan yang ada di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa tetap menjadi pusat perekonomian / bisnis.

- e. Pasa aspek teknis operasional, diperlukan pembangunan pangkalan militer yang lebih banyak lagi di wilayah Pulau Kalimantan, yang diperuntukkan untuk melindungi ibu kota sebagai *center of gravity* Indonesia. Pembangunan dan penambahan pangkalan angkatan laut dan udara, pangkalan Koarmada TNI AL, Kohanudnas TNI AL, dan Divisi Kostrad TNI AD harus terbangun di Pulau Kalimantan karena sekarang Pulau Kalimantan sangat strategis sebagai kantor presiden dan pusat pemerintahan, yang dapat menangkal setiap ancaman di wilayah Kalimantan Timur sebagai ibu kota Republik Indonesia. Perlu dipikirkan pembangunan Kodam-Kodam di Pulau Kalimantan. Ada 5 (lima) Provinsi di Pulau Kalimantan dan baru ada 2 (dua) Kodam, sehingga perlu dibangun 3 (tiga) Kodam lagi yang artinya satu provinsi satu kodam. Selanjutnya, perlu ditambah lagi pembangunan Korem dan Kodim. Di setiap provinsi harus dibangun minimal 2 Korem, sehingga terdapat 10 Korem. Pembangunan Kodim juga harus berbasis pada “satu kabupaten / kota satu Kodim”, karena selama ini di Pulau Kalimantan

satu Kodim banyak yang membawahi dua sampai tiga kabupaten/kota.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- a. Keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan merupakan keputusan yang bersejarah, monumental, dan mengarah pada Indonesia *centris* yang dinanti-nanti oleh berbagai pihak, mengingat setiap Presiden RI, dari masa ke masa, selalu memiliki ide dan gagasan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta, namun urung direalisasikan. Pemindahan ibu kota baru ke Provinsi Kalimantan Timur sangat beralasan mengingat wilayah ini relatif kecil potensi bencana alam / bencana sosial, lahan yang sudah dimiliki oleh pemerintah, tepat berada di tengah-tengah Indonesia, dan memiliki infrastruktur yang relatif lengkap karena berada di antara Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.
- b. Wilayah ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur sangat strategis dilihat dari geopolitik dan geostrategi Indonesia. Lokasinya berada di tengah-tengah antara Sabang dan Merauke serta antara Miangas dan Rote. Rentang kendali yang berada di tengah memungkinkan gelar pasukan ke semua titik terluar di seluruh wilayah Indonesia, baik Indonesia bagian utara, selatan, timur, dan barat. Wilayah ibu kota baru juga berdekatan dengan sungai dan pantai sehingga cocok untuk penggelaran pasukan militer, khususnya TNI AL, dalam kerangka visi pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang sangat penting dari sisi pertahanan negara.
- c. *Road map* RTRW Pertahanan Negara harus menjadi dasar utama dan pedoman teknis dalam pembangunan wilayah ibu kota baru. Rancang bangun, desain, tata letak, maupun *lay out* pembangunan gedung pemerintahan, fasilitas jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas publik lainnya harus dirancang dengan memperhatikan aspek RTRW Pertahanan Negara. Ibu kota negara yang baru harus dirancang untuk mengantisipasi serangan musuh dan jika negara dalam keadaan darurat perang. Ibu kota negara harus mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dalam kondisi negara seburuk apapun, sehingga diperlukan RTRW Pertahanan untuk ibu kota baru nantinya.

- d. Implementasi RTRW Pertahanan Negara harus melibatkan semua kementerian terkait, khususnya Kementerian Pertahanan dan Bappenas RI, sebagai pihak yang paling berwenang merancang ibu kota baru Republik Indonesia. Sinkronisasi RTRW Pertahanan Negara dan RTRW Pembangunan harus selaras dan seiring agar supaya desain ibu kota negara Republik Indonesia akan mampu menjadi *smart and green city*, sekaligus *secure and defence city*, yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan secara bersamaan dan berkesinambungan.

#### Saran

1. Perlunya Pemerintah, dalam hal ini Presiden, menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang RTRW Pertahanan Ibu Kota Baru Republik Indonesia, yang menjadi dasar hukum / payung hukum dalam membangun ibu kota baru yang berbasis pada security approach dan selaras dengan RTRW Pembangunan yang dibuat oleh Bappenas RI.
2. Perlunya DPR, khususnya Komisi I DPR, yang membidangi aspek pertahanan dan keamanan, untuk melakukan pengawasan dalam pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia, agar sesuai dengan ketentuan dan kaidah dalam RTRW Pertahanan, serta memberikan persetujuan dukungan anggaran yang memadai dalam mendesain ibu kota baru Republik

Indonesia yang sesuai dengan RTRW Pertahanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
- Mabes TNI AD, 2010, *Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat*, Jakarta
- Paleri, Prabakharan, 2008, *National Security : Imperatives and Challenges*, New Delhi : Tata McGraw-Hill.
- Samego, Indria, 2000, *TNI Di Era Perubahan*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Staf Teritorial Mabes TNI AD, 2010, *Buku Penyusunan RTRW Pertahanan Darat*, Jakarta.
- Subagyo, Agus, 2016, "Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi", dalam *Jurnal Agregasi Unikom*, Vol. 4, No. 1.
- Sulistyo, Hermawan, 2009, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*, Jakarta : Grafika Indah.

#### Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

**Sumber Lainnya**

1. Aswab Nanda Prattama. (2019). Wacana Pemindahan Ibu Kota pada Era Soekarno dan Sebelumnya, diakses pada tanggal 28 September 2019, Pukul 12.15 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/18544621/wacana-pemindahan-ibu-kota-pada-era-soekarno-dan-sebelumnya?page=all>.
2. Ihsanuddin.(2019). Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim, diakses pada tanggal 28 September 2019, Pukul 12.15 WIB.[https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-](https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-di-sebagian-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara?page=all)
3. Arie Dwi Satrio.(2019).Jadi Ibu Kota Baru, Kaltim Minim Konflik Sosial tapi Kritis Secara Lingkungan, diakses pada tanggal 29 September 2019, Pukul 10.15 WIB.<https://nasional.okezone.com/read/2019/08/30/337/2098795/jadi-ibu-kota-baru-kaltim-minim-konflik-sosial-tapi-kritis-secara-lingkungan>.
4. Yulaika Ramadhani . (2019). Alasan Jokowi Pilih Penajam-Kutai Jadi Ibu Kota Baru, Ganti Jakarta, diakses pada tanggal 28 September 2019, Pukul 12.15 WIB .<https://tirto.id/alasan-jokowi-pilih-penajam-kutai-jadi-ibu-kota-baru-ganti-jakarta-eg2i>.